EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB di Sumatera Utara

Desi Syahrani[1], Wira Hadi Sugara[2], Janisa Aulia[3], Tuti Yani[4], Putri Kemala Dewi Lubis[5]
[1,2,3,4,5]Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
E-mail: desisyahrani81@gmail.com[1], wirahadisugara1401@gmail.com[2], janisaaulia489@gmail.com[3], yantituti278@gmail.com[4], putrikemala@unimed.ac.id[5]

Article History:
Received: 09 Desember 2024
Revised: 10 Februari 2025
Accepted: 04 Maret 2025

Keywords: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, PDRB, Sumatera Utara*

Abstract: *Pada penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB tahun 2019-2023 pendapatan tertinggi di kota Medan dan terendah pada kabupaten Nias Selatan. Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan tertinggi terdapat di kota Medan dan terendah yaitu kabupaten Nias Barat. Pada Dana Alokasi Umum (DAU) pendapatan tertinggi terdapat di kota Medan dan terendah yaitu kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB di Sumatera Utara tahun 2019-2023, dengan menggunakan variabel dependen yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sedangkan variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data panel tahun 2019-2023 yang dikuatkan dengan beberapa uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Saat ini, pemerintah pusat tengah mengambil kebijakan untuk memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan komponen fundamental ekonomi dan aspek penting dari pemerataan pembangunan dan kemakmuran di berbagai kondisi daerah. Infrastruktur juga berdampak besar pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan sosial, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan riil (Atmaja & Mahalli, 2015). Pada dasarnya tentunya setiap daerah akan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan

terjadinya perubahan struktur ekonomi sehingga berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dapat dilihat dari perkembangan PDRB (Ramadhan et.al., 2022).

Pemerintah di Indonesia membentuk reformasi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menentukan sebuah kebijakan yang membahas pemerintahan daerah di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah sebagai bentuk upaya desentralisasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai dengan daerah masing-masing untuk mengembangkan suatu wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pendapatan dari suatu wilayah berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang mencakup retribusi daerah, pajak, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pinjaman daerah dan lain-lain adalah penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah. PAD dapat diibaratkan sebagai kemandirian keuangan daerah. Apabila jumlah PAD yang didapat oleh suatu daerah dibandingkan dengan dana bantuan dari pemerintah pusat maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri dengan jumlah PAD yang lebih besar menurut Tambunan dalam (Hananto, 2018).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi sumber daya alam. Saat ini, Pemerintah daerah terlalu bergantung pada DAU dan DBH untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan pendapatan dan potensi yang dimiliki daerah. Hal ini berdampak pada kurangnya kemampuan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.

Pemerintah harus lebih fokus untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah yang menjadi sumber PAD dan PDRB. Pengelolaan PAD, DAU dan DBH sangat mempengaruhi belanja daerah dan proses pembangunan daerah melalui program maupun kegiatan terutama dalam meningkatkan PDRB daerah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah-daerah. dengan cara meredistribusi pendapatan bruto dan kekayaan dalam menambah tingkat output. PDRB sangat mempengaruhi perekonomian jika PDRB menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan didaerah dan kesejahteraan masyarakat. PDRB sendiri tidak lepas dari tiga pendekatan yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran yang di kelola daerah (Anwar et al., 2018).

Berdasarkan pada tabel 1 dibawah, PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 Kota Medan memiliki PAD sebesar Rp. 2.338.282.167 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 21.079.843. Tahun 2020, PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.674.753.098 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 22.677.592 Sedangkan tahun 2021, PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 2.159.475.572 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 20.742.275. Pada tahun 2022 PAD tertinggi diperoleh kota Medan sebesar Rp.

2.864.618.773 dan PAD terendah diperoleh kabupaten Nias Barat sebesar Rp. 7.402.100. Pada tahun 2023 PAD tertinggi adalah kota Medan sebesar Rp. 2.259.282.403 dan PAD terendah yaitu kota Pakpak Bharat sebesar Rp. 20.281.858.

Tabel 1. PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Rupiah)

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Nias	86.228.075	88.468.900	60.539.025	15.542.000	62.694.500
Mandailing Natal	120.128.558	120.128.558	100.203.037	54.205.391	98.666.386
Tapanuli Selatan	138.751.608	165.382.118	107.891.473	108.597.047	130.155.562
Tapanuli Tengah	115.002.518	113.788.245	113.992.782	48.099.784	97.720.832
Tapanuli Utara	123.600.006	149.833.977	180.858.390	42.600.193	124.223.142
Toba	57.065.708	60.503.708	57.344.420	56.029.100	57.735.734
Labuhanbatu	197.779.176	233.229.176	211.905.419	166.141.983	202.263.939
Asahan	138.454.325	151.618.593	172.117.197	111.771.428	143.490.386
Simalungun	193.509.084	174.463.005	246.293.056	128.321.015	185.646.540
Dairi	86.180.996	86.927.335	86.204.500	34.206.000	73.379.708
Karo	105.471.699	103.840.957	102.340.958	84.295.158	98.987.193
Deli Serdang	1.168.365.751	1.179.949.961	1.431.739.168	1.333.307.000	1.278.340.470
Langkat	151.480.847	163.480.847	167.120.834	90.347.033	143.107.390
Nias Selatan	21.079.237	31.079.236	58.056.697	35.500.000	36.428.793
Humbang Hasundutan	66.211.385	70.130.038	75.226.769	24.453.788	59.005.495
Pakpak Bharat	21.286.889	22.677.592	20.742.275	16.420.675	20.281.858
Samosir	57.343.456	71.993.820	69.295.939	47.147.292	61.445.127
Serdang Bedagai	126.502.015	134.405.275	153.044.751	125.990.200	134.985.560
Batubara	90.410.760	175.914.283	144.830.369	110.344.885	130.375.074
Padang Lawas Utara	49.354.507	59.455.282	45.137.180	28.133.416	45.520.096
Padang Lawas	68.694.222	54.841.604	85.013.951	21.462.843	57.503.155
Labuhanbatu Selatan	59.064.373	80.836.376	70.244.120	37.411.734	61.889.151
Labuhanbatu Utara	56.772.356	59.778.488	59.812.484	47.934.473	56.074.450
Nias Utara	12.540.000	146.228.579	92.440.000	10.540.000	65.437.145
Nias Barat	17.721.454	22.856.503	17.942.259	7.402.100	16.480.579
Sibolga	114.280.408	123.069.925	89.181.855	34.367.808	90.224.999
Tanjungbalai	91.602.141	87.102.141	75.843.694	48.643.693	75.797.917
Pematangsiantar	119.600.220	118.949.279	115.861.372	102.802.689	114.303.390
Tebing Tinggi	108.650.471	119.402.798	115.750.713	51.636.700	98.860.171
Medan	2.338.282.167	1.674.753.098	2.159.475.572	2.864.618.773	2.259.282.403
Binjai	21.634.742	151.261.346	239.773.013	61.793.357	118.615.615
Padangsidimpuan	95.200.850	92.821.679	85.894.394	49.277.183	80.798.527
Gunungsitoli	34.019.889	28.571.605	28.207.404	24.906.300	28.926.300

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Dalam sebuah teori, Harrod-Domar menekankan bahwa pembentukan investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berperan sebagai tambahan stok modal. Semakin tinggi tingkat investasi, maka perekonomian akan mampu memproduksi barang dan jasa dengan jumlah yang lebih besar, sehingga akan meningkatkan jumlah PDRB. Berdasarkan sumbernya salah satu investasi yang modal nya berasal dari dalam negeri yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha dalam negeri, dan pemerintah dalam negeri. Selain investasi, pendapatan daerah juga berperan penting dalam menjadi modal atas pergerakan perekonomian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan terbesar yang ada di APBD yang berperan menanggung sebagian beban belanja daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dalam negeri yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004).

Berdasarkan tabel 2 dibawah, DAU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, DAU tertinggi dimiliki oleh Kota Medan sebesar Rp 1.686.885.959. dan DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 354.721.524. Tahun 2020, DAU tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.493.919.764 dan DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp 332.435.947. Sedangkan tahun 2021, DAU tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.576.566.420 dan DAU terendah diperoleh pada kota Pakpak Bharat sebesar Rp. 329.109.170. Pada tahun 2022 DAU tertinggi diperoleh kota Medan sebesar Rp. 1.532.893.067 sedangkan DAU terendah yaitu kota Pakpak Bharat sebesar Rp. 318.945.304. Pada tahun 2023 DAU tertinggi diperoleh kota Medan sebesar Rp. 1.678.680.488 sedangkan DAU terendah yaitu Pakpak Bharat Rp. 333.800.565.

Tabel 2. DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Rupiah)

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Nias	443.235.113	417.880.380	426.273.979	412.621.552	427.600.493
Mandailing Natal	821.584.130	751.402.758	766.908.677	743.340.668	776.807.821
Tapanuli Selatan	673.314.229	604.693.533	615.254.051	595.549.093	616.393.311
Tapanuli Tengah	670.689.528	609.816.945	623.187.906	603.228.847	626.798.338
Tapanuli Utara	659.877.311	606.062.527	617.410.172	597.808.962	621.360.689
Toba	547.891.356	519.088.428	527.775.092	510.871.853	528.752.368
Labuhanbatu	714.901.140	633.797.327	659.351.692	638.234.403	668.006.845
Asahan	916.413.719	830.586.749	845.782.109	818.693.947	867.011.558
Simalungun	1.253.335.104	1.136.239.874	1.157.869.531	1.120.786.035	1.192.094.534
Dairi	630.625.580	575.549.527	575.549.527	557.382.089	584.413.029
Karo	760.888.872	687.569.658	701.606.434	679.135.837	707.421.678
Deli Serdang	1.516.175.120	1.376.847.320	1.399.718.855	1.354.889.566	1.490.378.523
Langkat	1.226.388.643	1.099.658.531	1.117.780.638	1.081.981.083	1.160.932.782
Nias Selatan	588.723.530	626.743.578	637.989.763	617.556.640	646.287.245
Humbang Hasundutan	536.163.886	489.171.029	497.770.762	481.987.960	498.857.539
Pakpak Bharat	354.721.524	323.371.339	329.109.170	318.945.304	333.800.565
Samosir	465.740.446	418.883.094	427.830.255	414.328.359	429.309.554
Serdang Bedagai	799.392.981	727.436.456	741.896.149	718.135.179	760.868.887
Batubara	628.895.139	565.927.402	573.892.742	555.512.477	579.531.748
Padang Lawas Utara	554.953.633	521.528.022	530.916.406	513.951.816	531.940.130
Padang Lawas	541.104.708	496.576.468	506.486.046	490.835.624	508.014.871

Labuhanbatu Selatan	523.277.452	479.785.624	488.398.593	472.807.253	492.029.446
Labuhanbatu Utara	611.629.351	560.374.058	570.739.426	552.684.492	575.353.216
Nias Utara	429.326.187	392.014.347	401.228.290	389.171.996	404.119.977
Nias Barat	359.696.030	332.435.947	340.435.104	330.192.600	345.062.711
Sibolga	425.200.537	391.676.849	397.258.578	384.535.437	399.477.297
Tanjungbalai	446.820.629	410.581.497	416.591.491	403.249.168	418.215.735
Pematangsiantar	616.197.680	565.804.258	575.194.109	556.772.164	576.259.190
Tebing Tinggi	432.026.491	408.960.659	399.645.141	386.845.565	401.790.475
Medan	1.686.885.959	1.493.919.764	1.576.566.420	1.532.893.067	1.678.680.488
Binjai	592.485.217	535.778.557	550.250.084	532.627.031	551.268.977
Padangsidimpuan	524.337.438	476.335.400	483.580.247	468.092.452	484.475.688
Gunungsitoli	446.102.654	406.222.095	412.635.036	399.419.428	414.380.939

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Berdasarkan tabel 3 dibawah, PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan per kapita tertinggi selama 2019-2023 dimiliki oleh Kota Medan dengan PDRB per kapita pada tahun 2019 sebesar 68.575,55 milyar rupiah. Tahun 2020 dengan PDRB per kapita sebesar 63.321,37 milyar rupiah dan tahun 2021 dengan PDRB per kapita sebesar 64.385,21. Tahun 2022 dengan PDRB per kapita sebesar 67.069,36. Terakhir pada tahun 2023 dengan PDRB per kapita sebesar 70.102,69. Sedangkan , PDRB per kapita terendah selama 2019-2023 dimiliki oleh Kabupaten Nias Selatan dengan PDRB per kapita pada tahun 2019 sebesar 13.141,50 milyar rupiah. Tahun 2020 dengan PDRB per kapita sebesar 11.840,90 milyar rupiah dan tahun 2021 PDRB per kapita sebesar 11.794,46 milyar rupiah. Tahun 2022 PDRB per kapita sebesar 11.910,02 milyar rupiah. Terakhir pada tahun 2023 PDRB per kapita sebesar 12.101,50 milyar rupiah. Setiap daerah kabupaten/kota memiliki kenaikan PDRB berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari kemampuan kabupaten/ kota masing-masing daerah yang kurang maksimal dan seimbang dalam mengelola faktor-faktor produksi yang ada.

Tabel 3. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Milyar)

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Nias	17.832,37	17.833,32	17.838,50	18.128,21	18.568,76
Mandailing Natal	20.884,76	19.713,55	19.984,28	20.478,25	21.117,45
Tapanuli Selatan	34.333,37	32.405,69	32.975,91	34.088,97	35.367,85
Tapanuli Tengah	18.426,36	19.159,57	19.280,70	19.658,95	20.063,78
Tapanuli Utara	19.051,66	18.757,26	19.214,31	19.784,98	20.476,34
Toba	29.982,47	26.728,92	27.153,27	27.912,29	28.893,85
Labuhanbatu	46.516,86	47.272,34	48.315,51	49.923,23	51.728,18

Asahan	35.853,22	34.269,17	34.997,02	36.088,56	37.307,14
Simalungun	31.498,97	28.024,20	28.552,27	29.409,77	30.418,01
Dairi	23.130,29	21.142,88	21.211,34	21.702,73	22.378,47
Karo	34.241,30	35.330,58	35.629,71	36.613,90	37.943,70
Deli Serdang	32.323,39	36.611,69	36.907,07	38.028,82	39.443,61
Langkat	28.383,25	28.520,91	29.060,86	30.041,07	31.147,24
Nias Selatan	13.141,50	11.840,90	11.794,46	11.910,02	12.101,50
Humbang Hasundutan	21.688,75	20.981,72	21.099,17	21.729,65	22.418,78
Pakpak Bharat	17.192,81	16.352,23	16.446,15	16.810,89	17.373,82
Samosir	24.562,77	22.645,21	22.947,37	23.672,86	24.552,28
Serdang Bedagai	31.525,71	29.433,59	29.881,22	30.787,34	31.910,23
Batubara	57.372,55	58.368,43	58.809,82	60.167,67	61.604,30
Padang Lawas Utara	29.810,10	32.035,76	32.436,41	33.111,42	34.080,68
Padang Lawas	27.919,94	30.960,57	31.539,87	32.348,33	33.367,31
Labuhanbatu Selatan	54.619,16	60.340,69	61.527,78	63.251,15	65.192,03
Labuhanbatu Utara	47.262,92	45.457,41	46.346,68	47.611,40	49.004,95
Nias Utara	16.882,75	16.142,68	16.095,97	16.275,35	16.582,60
Nias Barat	15.101,76	14.000,41	14.063,35	14.181,10	14.409,44
Sibolga	40.822,38	39.360,25	39.814,69	41.245,31	42.759,18
Tanjungbalai	32.861,36	32.838,96	33.119,83	33.939,74	35.097,26
Pematangsiantar	37.562,88	35.261,71	35.332,66	36.243,57	37.461,49
Tebing Tinggi	23.924,93	22.810,10	23.054,98	23.681,70	24.328,72
Medan	68.575,55	63.321,37	64.385,21	67.069,36	70.102,69
Binjai	29.237,44	27.468,20	27.659,83	28.416,87	29.370,13
Padangsidimpuan	19.041,50	18.864,13	19.035,26	19.604,23	20.259,58
Gunungsitoli	23.944,19	25.344,25	25.496,68	25.830,23	26.332,06

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Sumatera Utara dan dimaksudkan untuk memenuhi tugas mini riset keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber–sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.Pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain– lain PAD yang sah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (local discretion) Mardiasmo (2018: 104). PAD merupakan

sumber penerimaan daerah yang aslidigali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha–usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dengan menggali potensi daerah, Pendapatan Asli Daerah akan meningkat, artinya penerimaan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sehingga daerah mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah (Melidha, 2023).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah bertujuan agar menghindari celah fiskal (fiscal gap) dan meratakan kesanggupan fiskal suatu wilayah, guna membantu independensi suatu pemerintah daerah pada pelaksanaan fungsi serta haknya dalam memberikan pelayanan kepada rakyat (Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Daerah, 2016). Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU yang bersumber dari pendapatan APBN merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikhususkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Block grants adalah jenis transfer yang paling umum diadopsi oleh negara-negara yang menjalankan desentralisasi (Bahl, 1986). Untuk jenis block grants, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana tersebut dan karenanya block grants tidak mempengaruhi pilihan- pilihan lokal. Selain itu, jika tujuan dari transfer adalah untuk peningkatan kesejahteraan secara umum, maka unconditional non-matching grant atau block grants seperti Dana Alokasi Umum (DAU) adalah yang terbaik (Shah (1994) dalam Wuryanto, 1996). Distribusi block grants membutuhkan formula yang memperhitungkan dua faktor penting yaitu kapasitas dan kebutuhan fiskal.Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah.

Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (Djaenuri, 2012:103).

Menurut Kuncoro (2004) DAU dikatakan block grant yang berarti bantuan kepada seluruh kabupaten dan kota yang memerlukan bantuan. DAU bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya yang dialokasikan dengan formula berdasarkan perhitungan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki keputusan dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. DAU memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses

pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAU merupakan dana dari APBN yang disalurkan untuk stabilitas keuangan seluruh daerah serta bantuan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota ditentukan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Produk Domestik Regional Bruto

Penghitungan produk domestik ini lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah pada satuan waktu tertentu (Kuncoro, 2004). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (Kuncoro, 2004).

Secara konsep, estimasi penghitungan nilai PDRB menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (at current price), dan atas dasar harga konstan (at constan price). Baik PDRB harga berlaku maupun harga konstan masing-masing mempunyai interpretasi data yang berbeda (Kuncoro, 2004). Menurut Sukirno (2016), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau provinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai tambah produksi (output) dikurangi dengan biaya antara. Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nasution (2010) dalam Rahman (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, serta Tenaga Kerja.

PDRB atas dasar harga berlaku adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dengan masih adanya faktor inflasi di dalamnya. PDRB atas dasar harga konstan adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi.PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi (Kuncoro, 2004).

PDRB perkapita dipengaruhi oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan jumlah penduduk, dengan kata lain PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar, masyarakat cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. PDRB perkapita merupakan hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dari tiap kabupaten/kota dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Apabila menyangkut tingkat kesejahteraan penduduk data PDRB perkapita lebih komprehensif dan relevan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih menekankan kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB karena secara simultan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan laju pertambahan penduduk. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah

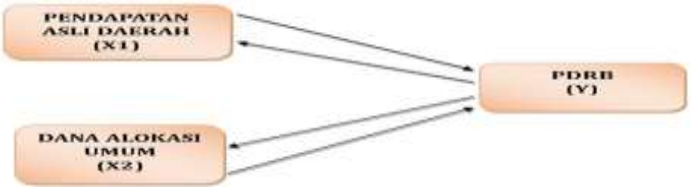
maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah). bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013). Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitiberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Kerangka Konsep

Trias dan Hastarini (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2012) dalam Abdul Salim bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan (mafahir dan Soelistiyo, 2017) yang menghasilkan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H1 : PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB
H2 : DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB
H3 : PDRB berpengaruh secara siginfikan terhadap PAD dan DAU

Berdasarkan studi literatur serta hipotesis tersebut yang menyatakan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pendapatan domsetik regional bruto di Sumatera Utara, maka kerangka konsepnya yaitu seperti gambar dibawah.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode yang berdasarkan pada pengumpulan daya dengan menggunakan instrument penelitian,analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yang dimana itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan dengan tujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa jurnal,artikel dan buku.

Metode pelaksanaan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode yang berdasarkan pada pengumpulan daya dengan menggunakan instrument penelitian,analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yang dimana itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan dengan tujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa jurnal,artikel dan buku.

EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh-pengaruh pada variabel yang sudah ditetapkan, maka dilakukan beberapa uji.

1. Pemilihan Estimasi Model.

a. Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	272.079416	(32,130)	0.0000
Cross-section Chi-square	696.154201	32	0.0000

Nilai probabilitinya 0,000 < 0,05, maka yang terpilih adalah model Fixed Effect Model.

b. Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.012765	2	0.2217

Nilai probabilitinya 0,2217 > 0,05, maka yang terpilih adalah model REM.

c. Uji Lagrange Multiplier

Tabel 3. Hasil Uji Lagrager Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 11/30/24 Time: 18:11
Sample: 2019 2023
Total panel observations: 165
Probability in ()

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	292.4221	6.330495	298.7526
	(0.0000)	(0.0119)	(0.0000)
Honda	17.10036	2.516048	13.87089
	(0.0000)	(0.0059)	(0.0000)
King-Wu	17.10036	2.516048	8.072271
	(0.0000)	(0.0059)	(0.0000)
GHM	--	--	298.7526

Nilai probabilitinya 0,000 < 0,05 maka yang terpilih adalah model REM

2. Uji Asumsi Klasik

EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

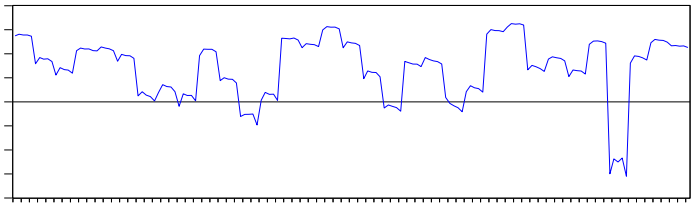
a. Uji Multikoliniearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikoliniertitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.776419
X2	0.776419	1.000000

Koefisien Korelasi X1 dan X2 sebesar 0,776419 < 0,85. Koefisien x2 dan X1 sebesar 0,776419 < 0,85. Maka dapat disimpulkan lolos uji multikolinearitas.

b. Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Nilai grafik residual (warna biru) dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500) artinya varian residual sama. Maka dapat disimpulkan lolos uji heterokedastisitas.

c. Uji Persamaan Regresi

Y = 1.27675438258-05*Y - 6.2775889849-11*X1 + 5.16234497549-10*X2 + [CX=R]

Keterangan:

1) Nilai koefisien sebesar 1.27675438258, artinya adanya variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1.27675438258
2) Nilai koefisien beta variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar -6,2775889849, artinya jika nilai variabel lain konstan dan variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel PDRB akan mengalami penurunan sebesar 6,2775889849 begitu pula sebaliknya, jika variabel lain konstan dan variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 6,2775889849
3) Nilai koefisien beta variabel ketimpangan pendapatan sebesar 5.16234497549 artinya jika nilai variabel lain konstan dan variabel ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan 1 satuan, maka Inklusi keuangan akan mengalami penurunan sebesar 5.16234497549 Begitupun sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel Dana Alokasi Umum mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 5.16234497549

EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

Dependent Variable: C
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 11/30/24 Time: 18:45
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y	1.28E-05	1.53E-06	8.344395	0.0000
X1	-6.28E-11	3.68E-11	-1.706196	0.0899
X2	5.16E-10	7.17E-11	7.197533	0.0000

1. Hasil uji t pada variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh t hitung sebesar 1.706196 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,695518731 dan nilai sig 0,0899 lebih besar dari 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara
2. Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Umum diperoleh nilai t hitung sebesar 7,197533 lebih besar dari t tabel yaitu 1,695518731 dan nilai sig 0,0000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya variabel DAU berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

Mean dependent var	1.000000
S.E. of regression	0.262210
Sum squared resid	11.13817
Log likelihood	-11.74055
F-statistic	-81.00000
Prob(F-statistic)	1.000000

Nilai f hitung sebesar -81,00000 lebih besar dari nilai f tabel yaitu 19,46543842 dan nilai sig yaitu 1,000000 lebih besar dari 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya variabel PAD dan DAU berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap PDRB, maka ditarik kesimpulannya yaitu pada estimasi model uji chow,uji hausman dan uji lagrange multiplier, pada uji masing-masing lebih besar dari 0,05 maka yang terpilih adalah Range Effect Model. Dari hasil uji t pada variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh t hitung sebesar 1,706196 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,695518731 dan nilai sig 0,0899 lebih besar dari 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak artinya variabel Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara. Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Umum diperoleh nilai t hitung sebesar 7,197533 lebih besar dari t tabel yaitu 1,695518731 dan nilai sig 0,0000 lebih besar dari 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak artinya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap PDRB di Sumatera Utara. Nilai f hitung sebesar -81,00000 lebih besar dari nilai f tabel yaitu 19,46543842 dan nilai sig yaitu 1,000000 lebih besar dari 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhdap PDRB di Sumatera Utara. Maka PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi.

DAFTAR REFERENSI

Afrizal Tahar,Maulida Zakhiya.(2011).Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.Jurnal Akuntansi dan Investasi.Vol 12 No 1.Hal 88-99

Andri Gustaf Eka Saputera,Pandoyo.(2020).Pengaruh DAU,PAD,DAK terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah.Jurnal Ekbank.Vol 3 No 2.Hal 17-28

Ardian Luthfan Aditya. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.Jurnal Syntax Idea.Vol 4 No 1.ISSN 2684-8831

Ardiani Maulidia Oktafia,Aris Soelistyo,Zainal Arifin.(2018).Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.Jurnal Ilmu Ekonomi.Vol 2 Jilid1.Hal 53-62

British Kharismanissa Islami,Benny Osta Nababan.(2020).Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor 2010-2016.Jurnal Jurismata.Vol 2 No 1.Hal 25-36

Heniwati Gulo. (2022).Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.Prosiding Seminar Nasional.Hal 25-31

Jefri Alfin Sinaga,Elidawaty Purba,Pawer Derasa Panjaitan.(2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun.Jurnal Ekonomi Pembangunan.Vol 2 No 1. ISSN 2614-7181

Patric Rarung. (2016).Pengaruh PAD dan PAU Terhadap PDRB di Kota Manado.Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.Vol 16 No 3.Hal 449-460

Rani Wulantari,Meidy Haviz.(2021).Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003-2017.Jurnal Riset Ilmu Ekonomi.Vol 1 No1.Hal 8-14

Siti Dini,Florentina Br Sigiro,Dwita Yohana Br Dolok Saribu,Joni Sm Hutagalung.(2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.Vol 5 No2.ISSN 2621-5306

Yani Nur Aeni,Suratno.(2015).Pengaruh PAD,DAU,DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto.Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan.Vol 2 No 1.Hal 32-42